

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### 2.1.1. Teori Kegunaan-Keputusan (Decision-Usefulness Theory)

Teori kegunaan keputusan (*decision usefulness theory*) dikemukakan pertama kali pada tahun 1954 dalam disertasi dengan judul *An Accounting Concept of Revenue di University of Chicago Amerika Serikat* oleh George J. Staubus. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama *A Theory of Accounting to Investors*. Teori ini didasarkan pada permasalahan yang timbul berkenaan dengan konsep akuntansi yang berdasarkan biaya historis, bahwa konsep biaya historis tidak relevan dengan penilaian akuntansi dengan harga pasar atau pendekatan nilai sekarang terhadap harga wajar. Octavia (2017)

Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Teori kegunaan keputusan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat (Staubus, 2000). Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Tingkat kebutuhan para pengguna laporan keuangan perlu dipertimbangkan dalam penyajian informasi akuntansi. Octavia (2017)

Pihak yang pertama kali menerima tujuan dari kegunaan keputusan tersebut dalam rangka pengembangan standar akuntansi adalah ASOBAT (*American Accounting Association's A Statement of Basic Accounting Theory*) pada tahun 1966. Teori kegunaan-keputusan selanjutnya menjadi dasar penyusunan APB Statement 4 tentang *Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises* yang dikeluarkan pada tahun 1970 dan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat sejak tahun 1980. Octavia (2017)

APB Statement 4 tentang *Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises* (1970) memperkenalkan gagasan tentang kandungan dari kualitas yang membuat informasi finansial berguna, yaitu relevan, dapat dipahami, dapat diperiksa, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan lengkap. Hal tersebut sesuai dengan fitur teori kegunaan-keputusan yang dikemukakan oleh Staubus tahun 1954 dan tidak bertentangan dengan kerangka dasar FASB yang disusun kemudian pada tahun 1980. Octavia (2017)

Pendekatan kriteria-kriteria yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan akuntansi tidak tersusun secara lengkap hingga tahun 1970, sampai dengan APB mengeluarkan pernyataan tentang basis kerangka konseptual untuk pertama kalinya. Manfaat dari kerangka dasar adalah membuat standar akuntansi menjadi lebih konsisten dan logis, dan meningkatkan kompatibilitas internasional dari standar akuntansi. Dengan adanya kerangka dasar pengakuan dan penyajian

pelaporan keuangan, penyusun kebijakan seharusnya menjadi lebih bertanggung-jawab terhadap keputusannya. Octavia (2017)

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Octavia (2017)

#### 2.1.2. Akuntansi Pemerintah

Bila dilihat dari tujuan pemakaiannya, bidang-bidang akuntansi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa yang salah satunya Akuntansi sektor publik yang memberikan informasi keuangan dengan cara tidak mencari laba. Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian keuangan pemerintah berdasarkan proses keuangan atas informasi keuangan. Dengan demikian secara umum pengertian akuntansi pemerintahan itu tidak berbeda dengan akuntansi, perbedaannya terletak pada jenis transaksi yang dicatat

dan penggunaannya secara umum adalah masyarakat secara luas yang diwakili oleh lembaga legislatif. Hasanah & Fauzi (2017:102)

Tujuan dari pemerintah adalah menyediakan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembangunan ekonomi suatu negara biasanya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dengan indikator *Produk Domestik Bruto* (PDB) sebagai indikatornya. Hal ini bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan yang optimal. Tambunan (2019: 250)

Ukuran keberhasilan perekonomian salah satunya diukur melalui *Pendapatan Domestik Bruto* (PDB) atau PDRB untuk perekonomian daerah, baik atas dasar konstan maupun atas dasar harga berlaku. Semakin tinggi PDRB maka semakin sejahteralah masyarakat Afdillah & Harahap(2015). Sebagian besar sumber dana yang diperoleh pemerintah berasal dari pajak, hutang, laba perusahaan negara atau daerah dan sumber lainnya. Seringkali sulit untuk memperkirakan besarnya keuntungan, manfaat atau imbal balik langsung bagi masyarakat secara proporsional. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara memiliki tugas khusus dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber dana tersebut kepada masyarakat selaku pembayar pajak, dan pihak pihak lain yang berkepentingan Rusmana (2012).

Menurut Sitorus (2015:931), Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di organisasi pemerintah. Akuntan pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini

meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara termasuk kesesuaian dengan UU yang berlaku Nordiawan (2008):

a. Tujuan Pemerintah dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

1) Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.

2) Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.

3) Pengawasan

Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK- RI.

b. Karakteristik akuntansi pemerintahan

Dikutip dari Hasanah & Fauzi (2017:104) Karakteristik akuntansi pemerintahan berbeda dengan akuntansi bisnis, perbedaannya seperti:

1) Akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba.

2) Akuntansi pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut

dibukukan.

- 3) Akuntansi pemerintahan biasanya menggunakan lebih dari satu jenis dana.
- 4) Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
- 5) Akuntansi pemerintahan bersifat tegak lurus dan mengikat terhadap peraturan yang berlaku .
- 6) Di dalam akuntansi pemerintahan tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca.

Meskipun ada perbedaan, akuntansi pemerintahan tetap memiliki kesamaan dengan akuntansi bisnis yaitu :

- 1) Memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi.
- 2) Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum.
- 3) Bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip dan standar akuntansi.
- 4) Menggunakan sistem bagan perkiraan standar.

#### c. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Lantang *et al.* (2016:1122) “standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak- pihak yang di luar organisasi”.

Dalam akuntansi sektor publik sendiri dikenal akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi

mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana. Lantang *et al* (2016:1123)

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemda di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP. Nordiawan (2008)

#### d. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah

Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan.

Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit lainnya. Dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapatkan:



1) Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi - organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama, yakni:

- a) Akuntansi Pemerintahan Pusat.
- b) Akuntansi Pemerintahan Daerah.
- c) Akuntansi Parpol dan LSM
- d) Akuntansi Yayasan.
- e) Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan: puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.
- f) Akuntansi Tempat Peribadatan: masjid, gereja, vihara, kuil.

2) Aktivitas yang mendekati diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta. Bastian (2019:15)

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang- undangan lainnya.

Oleh karena itu, adanya perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan kedua organisasi berbeda tetapi pada hakikatnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis sama yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu. Hasanah & Fauzi (2017:123)



### 2.1.3. Laporan Keuangan Akuntansi Pemerintah

Menurut Merantika & Heriyanto (2017:27), laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis AkruaI dapat dilaksanakan secara bertahap.

### 2.1.4. Hubungan Keuangan Pusat dengan Daerah

Berdasarkan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat dibentuk terlebih dahulu sebelum pembentukan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing pemerintahan mempunyai urusan sendiri namun tanggungjawab akhir dari urusan tersebut tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota dan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan keuangan. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, pembagian sumber keuangan, sejalan dengan pembagian urusan dan tatacara penyelenggaraan urusan tersebut dan pengaturan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan asas otonomi, daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Daerah dalam perpajakan dan retribusi tidak diatur secara rinci, karena akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pengaturan mengenai kewenangan perpajakan/retribusi ini diperlukan karena esensi dari otonomi

Daerah khususnya dibidang keuangan adalah adanya kewenangan Daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi. Pemberian kewenangan Daerah dalam perpajakan dan retribusi harus disesuaikan dengan pemberian tanggungjawab dalam urusan pemerintahan (Penjelasan RUU HKPD).

#### 2.1.5. Akuntansi Keuangan Daerah Secara Umum

Menurut Tanjung dalam Sembiring (2023:3), akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembaharuan sistem keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka

pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak – pihak eksternal entitas Pemerintahan Daerah. Indraswarawati (2020:81)

#### 2.1.6. Sistem Akuntansi Instansi

Menurut Nordiawan *et al.* (2008:231) SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian Negara/lembaga.

SAI terdiri atas dua subsistem, yaitu:

- a. SAK, subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementerian/instansi.
- b. SABMN, subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan dengan mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku

#### 2.1.7. Sistem Akuntansi Kas

Definisi sistem akuntansi kas dapat ditelaah dari ketiga kata penyusunannya, yaitu sistem, akuntansi, dan kas. Menurut Sutabri, sistem adalah sekumpulan komponen atau variable yang terorganisasi, saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kata kuncinya adalah sekumpulan komponen atau subsistem, sehingga sistem terdiri dari beberapa subsistem dan demikian juga sebaliknya. Komponen atau subsistem penyusun suatu sistem berinteraksi dan

bekerja sama satu dengan yang lainnya. Suatu sistem juga memiliki tujuan yang menjadi dasar kerja sistem tersebut.

Menurut Safri (2014:89), sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.

Sifat sistem terdiri dari empat kelompok diantaranya adalah:

- a. Sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya.
- b. Sistem Tertutup adalah sistem yang sama sekali tidak berhubungan dengan lingkungannya.
- c. Sistem Fisik adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sumber fisik.
- d. Sistem Konseptual adalah sistem yang menggunakan sumberdaya konseptual (data dan informasi) untuk mewakili suatu sistem fisik. Tambunan (2019:251)

Dengan menggunakan perspektif sistem, hampir semua hal di dunia ini dapat dipandang sebagai sistem. Perspektif sistem juga melihat suatu sistem relatif terhadap komponen penyusunnya (subsistem) maupun sistem yang lebih besar (supra sistem). Sarosa (2021:76)

Akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi pada suatu organisasi pada pihak yang membutuhkan. Seluruh pengambilan keputusan didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan keberadaan informasi mempunyai peranan yang sangat penting, baik mulai dari proses pengidentifikasian persoalan, mencari alternatif pemecahan persoalan, maupun

memonitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan operasional suatu organisasi, maka informasi akuntansi inilah yang sangat dibutuhkan. Ilyas (2020:210)

Jadi setelah melihat pengertian dari kedua istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan pada sebuah organisasi.

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai informasi akuntansi. Dengan demikian, sistem akuntansi terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

a. Formulir

Formulir dalam sistem akuntansi harus didesain sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai perintah kepada para pelaksana yang terlibat untuk melaksanakan suatu pekerjaan guna menjaga keabsahan transaksi. Prinsip perencanaan formulir yang baik, yaitu sederhana, murah, mudah diisi, dan membuat informasi secara tepat dan ringkas.

b. Jurnal (Buku Harian)

Jurnal adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat secara kronologis transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan, merupakan nama

perkiraan dan jumlah yang harus didebit maupun dikredit. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber informasi jurnal adalah formulir.

c. Buku Besar

Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan yang merupakan suatu kesatuan tersendiri. Buku besar terdiri dari perkiraan.

Tujuan Sistem Akuntansi dalam mewujudkan sistem akuntansi yang baik, pada dasarnya harus mengetahui pembangun sistem akuntansi itu sendiri, sistem akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan sumber daya lainnya didalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi merupakan suatu tujuan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Fani (2016:33)

Menurut Martini (2016:211) kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional organisasi. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban organisasi. Tidak ada standar akuntansi khusus terkait dengan kas namun secara umum dibahas dalam standar tentang instrument keuangan.

Keberadaan kas dalam entitas sangat penting karena tanpa kas, aktivitas operasi perusahaan tidak dapat berjalan. Entitas tidak dapat membayar gaji, memenuhi utang yang jatuh tempo dan kewajiban lainnya. Entitas harus menjaga jumlah kas agar sesuai dengan kebutuhannya. Jika jumlah kas kurang, maka kegiatan



operasional akan terganggu. Terlalu banyak kas, menyebabkan entitas tidak dapat memanfaatkan kas tersebut untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi.

Kas termasuk instrumen keuangan dalam klasifikasi aset keuangan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Kas terdiri atas uang kartal yang tersimpan dalam sebuah entitas, uang tersimpan dalam rekening bank, dan setara kas. Kas secara umum digunakan sebagai alat pembayaran untuk aktivitas operasi perusahaan tanpa suatu batasan. Ada kalanya kas dimiliki untuk tujuan tertentu sehingga tidak bebas digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas yang dicadangkan dengan penggunaan khusus tidak boleh dikategorikan sebagai kas, tetapi diklasifikasikan sebagai dana cadangan. Jika digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun dana cadangan ini akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kas yang dicadangkan untuk kegiatan khusus yang akan digunakan lebih dari satu tahun diklasifikasikan dalam aset tidak lancar. Martini, (2016:231)

Entitas terkadang memiliki kas dalam mata uang asing. Kas dalam mata uang asing tetap merupakan kas. Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing akan dinyatakan dalam mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal neraca.

Neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti sering berubah hampir setiap transaksi dengan pihak ektern maupun intern. Kas meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening giro Bank yang dimiliki perusahaan, serta elemen–elemen lainnya yang dapat disamakan dengan kas. Syarat suatu elemen yang dapat disamakan dengan kas :

- a. Dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran, khususnya didalam lingkungan Business.
- b. Dapat disetorkan sebagai atau kedalam rekening giro dan Bank pada setiap saat sesuai dengan nilai nominalnya.

Pengertian kas seperti tersebut diatas dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu elemen merupakan kas atau bukan. Elemen yang termasuk kas meliputi:

- a. Kas pada perusahaan (*Cash on hand*) yang terdiri atas:
  - 1) Uang tunai, yaitu uang logam dan kertas yang dimiliki perusahaan, termasuk juga uang tunai yang ada pada pemegang dana kecil.
  - 2) Cek yang diterima sebagai alat pembayaran dari pihak lain tetapi oleh perusahaan belum diuangkan atau disetor sebagai rekening giro di Bank.
  - 3) Elemen-elemen lainnya yang dapat dipersembahkan dengan kas, misalnya; pos wesel, bukti kiriman uang yang belum diuangkan dan sebagainya.
- b. Kas di Bank (*Cash in Bank*)

Kas di Bank adalah semua saldo rekening giro Bank yang dimiliki perusahaan dan dapat digunakan setiap saat sebagai alat pembayaran dengan menggunakan cek atau permintaan transfer uang.

Berdasarkan konteks diatas yang dimaksud sistem akuntansi kas adalah merupakan kesatuan yang melibatkan bagian-bagian, formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang digunakan perusahaan untuk menangani penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan. Ihwanudin (2020)

#### 2.1.8. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Darise (2008:111), kas adalah uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah. Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dasar atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah).

Pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diberikan Uang Persediaan (UP). Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. (Mahmudi, 2010:166). Dari prinsip kebenaran tersebut tentu setiap bagian pasti memiliki tugas dan harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dengan tidak berlaku curang, tentu hal ini juga berlaku pada bagian pengeluaran kas yaitu bendahara pengeluaran. Uang Persediaan digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk membayar tagihan atas belanja Negara. Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan pada (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kementrian Negara/Lembaga, Kepala (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Dalam

pelaksanaan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran. Mahmudi (2010:211)

a. Fungsi yang Terkait

Bagian ini bertanggung jawab mengeluarkan kas berdasarkan permintaan dari bagian yang memerlukan kas dengan mengajukan permintaan cek dan bagian ini bertanggung jawab dalam pencatatan pengeluaran kas kedalam jurnal pengeluaran kas berdasarkan bukti kas keluar dari fungsi kas (Tuerah, 2013:449). Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD.

b. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD terdiri atas (BPK, 2016):

- 1) Surat Penyediaan Dana (SPD), merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD.
- 3) Kuitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya, merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
- 4) SP2D, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.

- 5) Bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
  - 6) Buku jurnal pengeluaran kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas.
  - 7) Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan pembiayaan.
  - 8) Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.
- c. Laporan yang Dihasilkan
- 1) Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD terdiri atas:
    - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    - b) Neraca
    - c) Catatan atas Laporan keuangan (CALK)
  - 2) Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD terdiri atas:
    - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    - b) Neraca

- c) Laporan arus kas
  - d) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)<sup>49</sup>
- d. Uraian Prosedur
- 1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
  - 2) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, disertai rekening lawan asal pengeluaran kas tersebut.
  - 3) Bukti transaksi pengeluaran kas mencakup antara lain:
    - a) SP2D
    - b) Bukti Transfer
    - c) Bukti penerimaan lainnya
  - 3) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar.
  - 4) Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
  - 5) Pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
  - 6) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi

akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

### 2.1.9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Steven R. Ratela (2015)	Analisis Akuntansi atas .0Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif	Pencatatan Kas terjadi karena adanya pendapatan dan pengeluaran dana yang terjadi dalam proses akuntansi suatu SKPD. Di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara proses pencatatan kas yang terjadi memakai 2 (dua) sistem pencatatan Akuntansi, yaitu sebagai berikut: 1. Acrual Basic dan 2. Cash Basic
2	Stefy Hendy Tenda, Ventje Ilat, Stanley kho Walandouw (2015)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif	Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pemerintah ini Dokumen maupun Catata yang digunakan dalam membantu pengelolaan/penatausahaan pengeluaran kas masih sama dengan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran kas yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Sistem



No	Nama Pengarang	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Uang Persediaan
3	Rajab Nursusanti (2021)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi	Kualitatif	Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas sudah sesuai dengan kajian teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. BPKAD sudah menggunakan keempat dokumen yang harus ada dalam system akuntansi pengeluaran kas yaitu SPD, SPP, SPM, dan SP2D. Berdasarkan temuan yang ada semua dokumen sudah diterapkan dengan baik. Catatan akuntansi yang digunakan dalam system akuntansi pengeluaran kas sudah sesuai dengan kajian teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. BPKAD sudah menggunakan ketiga catatan akuntansi yang harus ada dalam system akuntansi pengeluaran kas yaitu buku jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku besar pembantu. Berdasarkan temuan yang ada semua catatan akuntansi sudah diterapkan dengan baik. Fungsi terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan kajian teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. BPKAD sudah menggunakan kelima fungsi sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu pejabatpelaksana teknis kegiatan, Bendahara pengeluaran, Pejabat penatausahaankeuangan OPD, Kuasa BUD, dan pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran. Berdasarkan temuan yang ada semua fungsi terkait sudahditerapkan dengan baik.

## 2.2. Kerangka Teoritis

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pelayanan Pimpinan, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas membantu pimpinan baik Bupati ataupun Pj Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Asisten melaksanakan urusan kegiatan pimpinan.

Tidak dipungkiri bahwa dalam menjalankan kegiatan dari suatu instansi, organisasi, maupun perusahaan, peran akuntansi dapat dinilai penting karena dapat memberikan informasi mengenai gambaran keuangan dari suatu instansi, organisasi, maupun perusahaan. Dalam aktivitas akuntansi tersebut, tentu diperlukannya pedoman atau acuan dalam melaksanakannya. Pedoman saat ini dalam instansi kedinasan termasuk Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kabupaten Lumajang adalah Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Sistem akuntansi tersebut merupakan kesatuan yang melibatkan bagian-bagian, formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang digunakan perusahaan untuk menangani penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan. Perubahan kas dipengaruhi oleh 2 aktivitas, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, membahas mengenai Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD. Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Penerimaan kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kas dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran uang dalam kegiatan. Bahkan bisa juga memperhitungkan keuangan yang akan datang. Begitu banyaknya fungsi dan kegunaan kas. Dengan adanya kas maka bisa mengetahui proses terjadinya pengelolaan uang. Dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, membahas mengenai Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD Pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis menunjukkan bahwasanya peran Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 penting sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam menunjang kelancaran operasional instansi. Untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran kas tentu pasti dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 membahas mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.

